



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR HKI-02.HH.01.03 TAHUN 2025

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2025**

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

sebagaimana...

Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi dikecualikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025



DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

LAMPIRAN

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Nomor : HKI-02.HH.01.03 TAHUN 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2025

A. Daftar Informasi Publik

I. Sekretariat Direktorat Kekayaan Intelektual

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Hard	Soft		
1	Laporan Keuangan (DJKI) Tahunan Audited	Tim Kerja Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Ketua Tim Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Berkala
2	Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Jakarta, 2025	-	v	5 tahun	Setiap saat
3	Surat Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Jakarta, 2025	v	v	3 tahun	Setiap saat
4	Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Jakarta, 2025	v	v	2 tahun	Setiap saat
5	Agenda Pimpinan Direktur Jenderal dan Sekretaris DJKI	Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Jakarta, 2025	v	v	3 tahun	Setiap saat

6	SOP Pengelolaan Keprotokolan Acara dan Upacara	Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat
7	SOP Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar Pimpinan Direktur Jenderal dan Sekretaris DJKI	Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat
8	Laporan Barang Milik Negara	Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara	Jakarta, 2025	v	v	3 Tahun	Berkala
9	SOP Penatausahaan BMN	Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat
10	Daftar Aset yang akan Dilelang	Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara	Jakarta, 2025	v	v	1 Tahun	Setiap saat
11	Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Tim Kerja Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Berkala
12	Pengumuman Proses Pengadaan	Tim Kerja Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Berkala
13	Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai Layanan Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi dan Kebijakan	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi dan Kebijakan	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Setiap saat
14	Surat Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran	Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Setiap saat

15	Perjanjian Kinerja	Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	v	v	4 Tahun	Setiap saat
16	Laporan Tahunan DJKI	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Ketua Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Jakarta, 2025	v	v	3 Tahun	Berkala
17	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJKI	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Ketua Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Jakarta, 2025	v	v	4 Tahun	Berkala
18	Target Kinerja DJKI	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Ketua Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Berkala
19	Standar Pelayanan Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	Ketua Tim Kerja Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	Jakarta, 2025	v	v	Selama berlaku masih	Setiap saat
20	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Ketua Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Setiap saat
21	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Ketua Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Setiap saat
22	Rencana Strategis (2020-2024)	Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	v	v	Permanen	Berkala
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Ketua Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Internal	Jakarta, 2025	v	v	Selama berlaku masih	Setiap saat

24	Proses Bisnis DJKI	Tim Kerja Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	Ketua Tim Kerja Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
25	Rencana Kerja K/L	Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	v	v	Permanen	Berkala
26	Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	v	v	3 Tahun	Berkala
27	Indikator Kinerja Utama (2020-2024)	Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Berkala
28	Kompilasi Peraturan Perundang-undangan	Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi dan Kebijakan	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi dan Kebijakan	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Berkala
29	SK Kenaikan Gaji Berkala tanpa informasi: - Nama - Pangkat - Masa kerja - Jabatan	Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Setiap saat
30	Data Statistik Pegawai	Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 2025	v	v	3 Tahun	Setiap saat
31	SK Penghargaan Satya Lencana	Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Berkala
32	Surat Tugas Izin Belajar	Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 2025	v	v	3 Tahun	Berkala

33	SOP Kepegawaian	Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat
34	Data Statistik Pelatihan Kompetensi Pegawai	Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 2025	v	v	3 Tahun	Berkala
35	SOP Bidang Kehumasan	Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Pelayanan Publik	Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Pelayanan Publik	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat
36	Laporan bulanan Bidang Publikasi dan Media	Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Pelayanan Publik	Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Pelayanan Publik	Jakarta, 2025	v	-	3 tahun	Berkala
37	Laporan bulanan Bidang Layanan Informasi dan Pengaduan DJKI	Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Pelayanan Publik	Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Pelayanan Publik	Jakarta, 2025	v	-	3 tahun	Berkala

II. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Hard	Soft		
1	Formulir dan Format Surat Digital Permohonan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Jakarta, 2025	-	v	Menyesuaikan JRA Kemenkumham	Berkala

2	Berita Resmi: <ul style="list-style-type: none"> • Paten Seri-A, Seri-B, Seri-C • Paten Sederhana Seri-A, Seri-B Seri-C • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • Pencatatan Perjanjian Lisensi RD 	Tim Kerja Publikasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Subdirektorat Permohonan Pelayanan dan	Jakarta, 2025	-	v	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Berkala
3	Hasil Klasifikasi Paten	Tim Kerja Klasifikasi, Penelusuran, dan Pemanfaatan Informasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Ketua Tim Kerja Klasifikasi, Penelusuran, dan Pemanfaatan Informasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Jakarta, 2025	-	v	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Setiap Saat
4	Informasi Peringatan Dini Pemeliharaan Paten	Tim Kerja Pemeliharaan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Jakarta, 2025	v	v	1 Tahun	Berkala
5	Salinan Dokumen Paten	Tim Kerja Sertifikasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Subdirektorat Permohonan Pelayanan dan	Jakarta, 2025	v	v	Selamanya	Setiap Saat
6	Jadwal Persidangan Komisi Banding Paten	Tim Kerja Fasilitasi Komisi Banding Paten	Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding	Jakarta, 2025	-	v	1 tahun	Berkala
7	Putusan Komisi Banding Paten	Tim Kerja Fasilitasi Komisi Banding Paten	Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding	Jakarta, 2025	v	v	Selamanya	Berkala
8	Dokumen Hasil Sengketa Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di Pengadilan Niaga (yang sudah berkekuatan hukum tetap)	Tim Kerja Pelayanan Hukum Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Paten	Jakarta, 2025	v	v	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Berkala

9	Dokumen Regulasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Tim Kerja Pelayanan Hukum Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Paten	Jakarta, 2025	-	v	Selamanya	Berkala
10	Pendapat Hukum	Tim Kerja Pelayanan Hukum Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Paten	Jakarta, 2025	v	v	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
11	Tanggapan pemeriksaan atas kembali Formalitas	Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Jakarta, 2025	-	v	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
12	Tanggapan pemeriksaan atas kembali Substantif	Tim Kerja Pemeriksaan Paten	Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Paten	Jakarta, 2025	v	v	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
13	Dokumen hasil penelusuran paten	Tim Kerja Klasifikasi, Penelusuran, dan Pemanfaatan Informasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Ketua Tim Kerja Klasifikasi, Penelusuran, dan Pemanfaatan Informasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Jakarta, 2025	-	v	Menyesuaikan JRA Kemenkumham	Setiap Saat
14	SOP Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Tata Usaha Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Kepala Sub Bagian TU Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Jakarta, 2025	-	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat

15	Laporan tahunan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Tata Usaha Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Kepala Sub Bagian TU Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Jakarta, 2025	-	v	Selama masih berlaku	Berkala
16	Dokumen Petikan Daftar Umum Paten	Tim Kerja Sertifikasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Jakarta, 2025	v	-	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Setiap Saat

III. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Soft	Hard		
1	Publikasi Permohonan Merek (Berita Resmi Merek)	Tim Kerja Publikasi, Dokumentasi dan Pelayanan Teknis	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Berkala
2	Publikasi Permohonan IG (Berita Resmi IG)	Tim Kerja Indikasi Goeografis	Ketua Tim Kerja Indikasi Goeografis	Jakarta, 20245	v	v	Selama masih berlaku	Berkala
3	Informasi merek dan Indikasi Geografis pada laman pdki.dgip.go.id dan ig.dgip.go.id	Tim Kerja Publikasi, Dokumentasi dan Pelayanan Teknis	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Jakarta, 2025	v	v	Selamanya	Berkala
4	Informasi Proses Permohonan Banding Merek	Tim Kerja Pelaksanaan Fasilitasi Komisi Banding Merek	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Merek	Jakarta, 2025	v	v	Selamanya	Berkala

5	Informasi Jadwal Sidang Komisi Banding Merek	Tim Kerja Pelaksanaan Fasilitas Komisi Banding Merek	Kepala Subdirektorat Fasilitas Komisi Banding Merek	Jakarta, 2025	v	v	1 tahun	Berkala
6	Putusan Komisi Banding Merek	Tim Kerja Pelaksanaan Fasilitas Komisi Banding Merek	Kepala Subdirektorat Fasilitas Komisi Banding Merek	Jakarta, 2025	v	v	Selamanya	Setiap Saat
7	SOP Penerbitan Sertifikat	Tim Kerja Sertifikasi, Mutasi, Lisensi	Kepala Subdirektorat Fasilitas Komisi Banding Merek	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
8	SOP dan Panduan pemeriksaan substantif Merek	Tim Kerja Pemeriksaan Substantif Merek	Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Substantif Merek	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
12	Laporan Bulanan Subdirektorat permohonan dan pelayanan merek	Subbagian Tata Usaha Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	Subbagian Tata Usaha Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	Jakarta, 2025	v	v	1 Tahun	Setiap Saat
13	Laporan Bulanan Subdirektorat Fasilitas Komisi Banding Merek	Subbagian Tata Usaha Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	Subbagian Tata Usaha Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	Jakarta, 2025	v	v	1 Tahun	Setiap Saat
14	Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Terdaftar	Tim Kerja Indikasi Geografis	Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
15	Dokumen Regulasi Terkait Merek dan Indikasi Geografis	Tim Kerja Advokasi Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendapat Hukum, Litigasi, Keterangan Ahli dan Perundang-undangan	Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendapat Hukum, Litigasi, Keterangan Ahli dan Perundang-undangan	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
16	Petikan Sertifikat Merek	Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Jakarta, 2025	v	v	Selamanya	Setiap Saat
17	Informasi Adanya Pencatatan Mutasi dan Lisensi Merek	Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat

18	SOP Penerbitan Indikasi Geografis	Subdirektorat Permohonan Pelayanan dan	Kepala Subdirektorat Permohonan Pelayanan dan	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
19	SOP dan Panduan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	Tim Kerja Indikasi Goeografis	Ketua Tim Kerja Indikasi Goeografis	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
20	Petikan Sertifikat Indikasi Geografis	Tim Kerja Indikasi Goeografis	Ketua Tim Kerja Indikasi Goeografis	Jakarta, 2025	v	v	Selamanya	Setiap Saat
21	Informasi Pemakai Indikasi Geografis	Tim Kerja Indikasi Goeografis	Ketua Tim Kerja Indikasi Goeografis	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat

IV. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Hard	Soft		
1	SOP Permohonan Desain Industri	Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
2	SOP Permohonan Hak Cipta	Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap Saat

3	SOP tentang Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) : 1. Permohonan Pencatatan KIK 2. Permohonan Penghapusan KIK 3. Permohonan perubahan data KIK setelah adanya surat pencatatan	Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
4	Informasi tata cara pendaftaran Desain Industri	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Berkala
5	Informasi tata cara pencatatan Hak Cipta	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Berkala
6	Publikasi Berita Resmi Desain Industri pada laman resmi DJKI	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, KIK	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Berkala
7	Daftar umum Desain Industri	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat

8	Juklak pemeriksaan substantif Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Substansi	Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Substansi	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap Saat
9	SOP Permohonan Keberatan Atas penolakan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pengajuan Keberatan Desain Industri, Perumusan Kebijakan dan Peraturan dan Fasilitasi Lembaga Manajemen Kolektif	Ketua Tim Kerja Pengajuan Keberatan Desain Industri, Perumusan Kebijakan Instrumen Hukum dan Fasilitasi Lembaga Manajemen Kolektif	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
10	SOP Penerbitan Sertifikat	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap Saat
11	Surat Pencatatan KIK	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	-	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
12	SOP Petikan daftar umum Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
13	SOP Perubahan Nama dan Alamat Pemegang HCDI	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat

14	SOP Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta dan Sertifikat Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
15	Informasi tata cara Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta dan Sertifikat Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Berkala
16	SOP permohonan pengalihan Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
17	SOP permohonan pencatatan perjanjian lisensi	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
18	Rekapitulasi perubahan Nama dan Alamat Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
19	SOP Permohonan Penghapusan dan Pembatalan Ciptaan Tercatat	Ketua Tim Kerja Analisa Hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Analisa Hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat

20	SOP Permohonan Penghapusan dan Pembatalan Desain Industri	Ketua Tim Kerja Analisa Hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Analisa Hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan	Setiap saat
21	Data Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal	Ketua Tim Kerja Permohonan, Publikasi dan Pelayanan Teknis Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal	Jakarta, 2025	v	v	Selamanya	Berkala
22	Laporan audit keuangan manajemen kolektif	Ketua Tim Kerja Pengajuan Keberatan Desain Industri, Perumusan Kebijakan dan Peraturan dan Fasilitasi Lembaga Manajemen Kolektif	Ketua Tim Kerja Pengajuan Keberatan Desain Industri, Perumusan Kebijakan dan Peraturan dan Fasilitasi Lembaga Manajemen Kolektif	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Berkala
23	Laporan Kinerja Bulanan Direktorat HCDI meliputi: 1. Permohonan Hak Cipta dan Desain Industri; 2. Publikasi Desain Industri; 3. Hasil Pemeriksaan Desain Industri; 4. Penerbitan e-sertifikat Desain Industri; 5. Pelayanan Pasca Pencatatan Hak Cipta; 6. Pelayanan Pasca Pendaftaran Desain Industri;	Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Berkala

	7. Pelayanan Hukum Bidang Hak Cipta dan Desain Industri							
	8. Laporan Bulanan KIK							

V. Direktorat Penegakan Hukum

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Hard	Soft		
1	SOP Pengaduan Pelanggaran Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi	Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat
2	SOP Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan	Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi	Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat
3	SOP Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi	Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat
4	Tata Cara Permohonan Penutupan Situs Berdasar Peraturan Menteri Bersama Menkum HAM dan Menteri Komunikasi dan	Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan	Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan	Jakarta, 2025		v	Selama masih berlaku	Setiap Saat

	Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Thn 2015							
5	SOP Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Pencegahan	Tim Kerja Pencegahan	Jakarta, 2025		v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
6	SOP Penyelesaian Sengketa Alternatif	Tim Kerja Mediasi	Tim Kerja Mediasi	Jakarta, 2025		v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
7	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum di Bidang KI	Direktorat Penegakan Hukum	Tim Kerja Pencegahan	Jakarta, 2025	v	v	2 Tahun	Berkala
8	Laporan Data Statistik Perkara Pelanggaran di Bidang KI	Direktorat Penegakan Hukum	Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi	Jakarta, 2025		v	2 Tahun	Berkala
9	Laporan tahunan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Direktorat Penegakan Hukum	Tata Usaha Direktorat Penegakan Hukum	Jakarta, 2025	v	v	2 Tahun	Berkala

VI. Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Hard	Soft		
1	Rekapitulasi MoU/PKS Dalam Negeri dan Luar Negeri	1. Tim Kerja Kemitraan Bilateral 2. Tim Kerja Kemitraan Regional 3. Tim Kerja Kemitraan Multilateral dan Organisasi Internasional 4. Tim Kerja Kemitraan Dalam Negeri (Nasional)	Kepala Subdirektorat Kerja Sama	Jakarta, 2025	v	v	3 tahun	Setiap Saat
2	SOP Perencanaan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri	1. Tim Kerja Kemitraan Bilateral 2. Tim Kerja Kemitraan Regional 3. Tim Kerja Kemitraan Multilateral dan Organisasi Internasional 4. Tim Kerja Kemitraan Dalam Negeri (Nasional)	Kepala Subdirektorat Kerja Sama	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
3	Data-data RUKI (Guru KI)	1. Tim Kerja Diseminasi, Promosi, dan Pemberdayaan 2. Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	1. Tim Kerja Diseminasi, Promosi dan Pemberdayaan 2. Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	Jakarta, 2025	v	v	3 tahun	Setiap saat
4	Prosedur Pendaftaran RUKI	1. Tim Kerja Diseminasi, Promosi, dan Pemberdayaan 2. Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	1. Tim Kerja Diseminasi, Promosi, dan Pemberdayaan 2. Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Berkala

5	Laporan Kegiatan terkait Diseminasi KI	Tim Kerja Diseminasi, Promosi, dan Pemberdayaan	Tim Kerja Diseminasi, Promosi, dan Pemberdayaan	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Berkala
6	Materi Diseminasi dan Promosi di Lingkungan Direktorat KSE	Tim Kerja Diseminasi, Promosi, dan Pemberdayaan	Tim Kerja Diseminasi, Promosi, dan Pemberdayaan	Jakarta, 2025	v	v	3 tahun	Setiap saat
7	Dokumen MoU Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri	1. Tim Kerja Kemitraan Bilateral 2. Tim Kerja Kemitraan Regional 3. Tim Kerja Kemitraan Multilateral dan Organisasi Internasional 4. Tim Kerja Kemitraan Dalam Negeri (Nasional)	Kepala Subdirektorat Kerja Sama	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Setiap Saat
8	Rencana Kerja (<i>Work Plan, Business Plan</i>) Implementasi Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri	1. Tim Kerja Kemitraan Bilateral 2. Tim Kerja Kemitraan Regional 3. Tim Kerja Kemitraan Multilateral dan Organisasi Internasional 4. Tim Kerja Kemitraan Dalam Negeri (Nasional)	Kepala Subdirektorat Kerja Sama	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Setiap Saat
9	Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional	Tim Kerja Kemitraan Multilateral dan Organisasi Internasional	Tim Kerja Kemitraan Multilateral dan Organisasi Internasional	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Setiap Saat
10	Data Konsultan KI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Jakarta, 2025	v	v	5 tahun	Setiap Saat
11	Pengumuman penyelenggaraan pelatihan Konsultan KI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Berkala

12	Daftar literasi antara lain: - Modul KI - Data koleksi perpustakaan Online Public Access Catalog (OPAC) - E-book	Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	Jakarta, 2025	v	v	2 tahun	Berkala
13	Daftar Nama Narasumber dan Peserta Edukasi	Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	Jakarta, 2025	v	v	2 tahun	Berkala
14	Materi Edukasi Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual	Jakarta, 2025	v	v	2 tahun	Setiap Saat
15	Daftar Sentra KI	Tim Kerja Kemitraan Dalam Negeri (Nasional)	Tim Kerja Kemitraan Dalam Negeri (Nasional)	Jakarta, 2025	v	v	2 tahun	Setiap Saat
16	Juklak Juknis Tata Cara Pemeriksaan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Berkala
17	Juklak Juknis Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Konsultan Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Berkala
18	Juklak Juknis Tata Kerja Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Berkala
19	Laporan Pemantauan Evaluasi Konsultan Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas MPKKI	Jakarta, 2025	v	v	3 Tahun	Setiap saat
20	Penunjukan	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitas	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan	Jakarta, 2025	v	v	3 Tahun	Setiap saat

	Konsultan Protokol	MPKKI	Fasilitasi MPKKI					
21	Surat Keputusan Pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual dan/ atau Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitasi MPKKI	Tim Kerja Pembinaan Konsultan KI dan Fasilitasi MPKKI	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap saat

VII. Direktorat Teknologi Informasi

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Hard	Soft		
1	Panduan Penggunaan Aplikasi Permohonan Kekayaan Intelektual	Sekretaris Pengembangan Aplikasi Substantif	Direktur Teknologi Informasi	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Berkala
2	Alur/Prosedur Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan	Direktur Teknologi Informasi	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Berkala
3	Informasi Data Permohonan Kekayaan Intelektual pada PDKI	Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan	Direktur Teknologi Informasi	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Berkala

4	Data Statistik Permohonan Kekayaan Intelektual	Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan	Direktur Teknologi Informasi	Jakarta, 2025		v	Selama masih berlaku	Setiap Saat
5	Daftar Berita Resmi pada website DJKI	Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan	Direktur Teknologi Informasi	Jakarta, 2025		v	5 Tahun	Berkala
6	Pengumuman terkait kendala teknis yang dialami DJKI	Tim Kerja Infrastruktur dan Bantuan Teknis	Direktur Teknologi Informasi	Jakarta, 2025		v	1 Tahun	Serta Merta
7	Pengumuman terkait dengan informasi dan/atau perubahan kebijakan sistem DJKI	Tim Kerja Infrastruktur dan Bantuan Teknis	Direktur Teknologi Informasi	Jakarta, 2025		v	1 Tahun	Serta Merta
8	IT <i>Master Plan</i>	Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan	Direktur Teknologi Informasi	Jakarta, 2025	v	v	5 Tahun	Setiap Saat
9	SOP Direktorat Teknologi Informasi	Subbagian Tata Usaha Direktorat Teknologi Informasi	Direktur Teknologi Informasi KI	Jakarta, 2025	v	v	Selama masih berlaku	Setiap Saat

B. Daftar Informasi Dikecualikan

I. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
1	Data Personal Kepegawaian - NIP - NIK - Tanggal Lahir - Alamat	Pasal 17 Huruf (h) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan
2	Surat Menyurat Pimpinan yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	Pasal 17 huruf (i) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	SK Pensiun Pegawai	Pasal 17 huruf (i) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
1	Permohonan paten yang belum diumumkan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Menjaga kerahasiaan invensi dan dokumen permohonan paten	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2	Salinan Deskripsi Paten yang Belum Dipublikasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Menjaga kerahasiaan invensi dan dokumen permohonan paten	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Dokumen Permohonan Paten Terkait Pertahanan dan Keamanan	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Dokumen atas permohonan keberatan (oposisi) dan sanggahan paten	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Dokumen Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang belum Dipublikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Dokumen Perjanjian Lisensi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang belum Dipublikasi	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengungkapkan data pribadi dan mengungkapkan substansi perjanjian yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi perjanjian yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7	Analisa pemeriksaan substantif permohonan Paten dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	Dokumen Tanggapan Pemohon Dalam Proses Pemeriksaan Substantif	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Dapat mengungkapkan data pribadi dan mengungkapkan substansi pemeriksaan yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi pemeriksaan yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	Sertifikat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Dokumen proses penegakan hukum terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11	Dokumen rekomendasi tanggapan atau pertimbangan hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengungkapkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12	Dokumen proses Permohonan Banding Paten	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	Analisa Hasil Pemeriksaan Substantif Pemeriksa Paten	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

III. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
1	Dokumen proses penegakan hukum terkait Merek dan Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	30 tahun atau ditentukan lain di dalam persidangan

2	Dokumen rekomendasi tanggapan atau pertimbangan hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Dokumen proses Permohonan Banding Merek	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	30 tahun atau ditentukan lain di dalam persidangan
4	Dokumen Hasil pemeriksaan substantif permohonan Merek untuk para pihak	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia 	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Dokumen oposisi dan sanggahan untuk para pihak	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi Memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Dokumen Tanggapan Pemohon Dalam Proses Pemeriksaan Substantif	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan
7	Dokumen Pendukung Permohonan Merek dan Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	Sertifikat Merek	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9	Dokumen Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak atas Merek	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan
10	Dokumen Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11	Dokumen Hasil pemeriksaan substantif Permohonan Indikasi Geografis untuk para pihak	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12	Sertifikat Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	Dokumen Pencatatan Pemakai Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan
14	Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual dan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan
15	Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Merek	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan

16	Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Permohonan Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan
17	Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Indikasi Geografis	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan data pribadi dan membocorkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan

IV. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
1	Dokumen pendukung permohonan Hak Cipta	Pasal 17 huruf b dan h, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkapkan data pribadi dan adanya penyalahgunaan data pribadi pemohon	Dapat melindungi data pribadi dari penyalahgunaan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
2	Dokumen Pendukung permohonan Desain Industri	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengungkapkan data pribadi dan adanya penyalahgunaan data pribadi pemohon	Dapat melindungi data pribadi dari penyalahgunaan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi

3	Dokumen bukti prioritas Desain Industri: Informasi identitas, gambar, dan uraian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Dokumen keberatan dan sanggahan atas Permohonan Desain Industri	Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengungkapkan data pribadi dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi data pribadi dan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau selain yang bersangkutan
5	Dokumen Hasil pemeriksaan substantif pengajuan Desain Industri	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Sertifikat Desain Industri beserta lampirannya	Pasal 17 huruf b b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	Surat Pencatatan Hak Cipta	Pasal 17 huruf b b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 69 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	Dokumen pendukung Koreksi Sertifikat atas permohonan Hak Cipta dan Desain Industri	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Dapat mengungkapkan data pribadi dan adanya penyalahgunaan data pribadi pemohon dan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi data pribadi dari penyalahgunaan dan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9	Surat pengalihan Hak Cipta dan Desain Industri	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Pasal 76 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Surat pencatatan lisensi Hak Cipta dan Desain Industri	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi kepentingan perlindungan Hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11	Dokumen proses penyelesaian perkara hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyidikan perkara hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	Melindungi proses Penyidikan perkara hukum Hak Cipta dan Desain Industri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12	Dokumen rekomendasi tanggapan atau pertimbangan hukum dalam proses PK (Keberatan atas putusan tolak)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan substansi memorandum yang sifatnya rahasia dan mempengaruhi proses penegakan hukum	Dapat melindungi substansi memorandum yang sifatnya rahasia dan proses penegakan hukum akan adil	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	Dokumen permohonan izin operasional lembaga manajemen kolektif	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
14	Dokumen permohonan perpanjangan izin operasional lembaga manajemen kolektif	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi

V. Direktorat Penegakan Hukum

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
1	Dokumen Administrasi Pengaduan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	30 tahun atau ditentukan lain di dalam persidangan
2	Dokumen Administrasi Penyelesaian Sengketa Alternatif Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	30 tahun atau ditentukan lain di dalam persidangan

VI. Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
1	Laporan Hasil Pelatihan Konsultan KI	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
2	Dokumen Output Pembahasan Draft Kerja Sama Luar Negeri	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan isi/draft memorandum/dokumen yang sifatnya rahasia	Dapat melindungi isi/draft memorandum/dokumen yang sifatnya rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3	Data lengkap narasumber dan peserta kegiatan edukasi, promosi, dan diseminasi KI	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
4	Posisi runding Indonesia dalam perundingan FTA/CEPA untuk tim perunding	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan isi/draft memorandum/dokumen yang sifatnya rahasia dan dapat mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan/sedang dilakukan	Dapat melindungi isi/draft memorandum/dokumen yang sifatnya rahasia dan melindungi keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan/sedang dilakukan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Konsultan Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi
6	Surat Rekomendasi Penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual dan/ atau Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi

VII. Direktorat Teknologi Informasi

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
1	Lokasi Infrastruktur dan Data Center Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
2	Topologi Jaringan Data Center	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
3	IP Address Private di Lingkup DJKI	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
4	Username dan Password Layanan Sistem Informasi DJKI	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
5	Source Code Layanan Aplikasi pada DJKI	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
6	Data Penanganan masalah jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun
7	Konfigurasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	20 Tahun



DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU